

RIVALITAS ELITE PURI DALAM POLITIK (STUDI KASUS: RIVALITAS ELITE PURI UBUD, PURI PELIATAN, DENGAN PURI GIANYAR DALAM PEMILUKADA TAHUN 2012-2018)

Ida Bagus Ananta Ari Brahmanta¹⁾, Muhammad Ali Azhar²⁾, Piers Andreas Noak³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: anantabrahmanta@gmail.com¹, aliazhar23mr@yahoo.co.id², piersandreasnoak@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study to determine elite Puri Ubud, Puri Peliatan, and Puri Gianyar compete in the Gianyar Pilbup 2012-2018. This research uses conflict theory from Ralf Dahrendorf with qualitative descriptive method, uses primary and secondary data. The results of the research are: first, the rivalry that occurred was an old rivalry and was repeated in the 2012 Gianyar Pilbup, which at that time also showed that the political struggle between brothers was won by the elite of Puri Gianyar. Second, the defeat of the Puri Peliatan elite made the Puri Ubud elite take a political role fight the Puri Gianyar elite in the 2018 Pilbup and another victory was won by Puri Gianyar. The defeat of Puri Peliatan and Puri Ubud was due to the lack of character, party base. In addition to clan stakes, party bases also dominate this conflict, PDIP (Puri Gianyar) and Golkar (Puri Ubud and Puri Peliatan).

Keyword: Rivalry, Elites Puri, Regional Head Election, Gianyar Regency, Year 2012-2018

1. PENDAHULUAN

Pertarungan dan pertarungan dinasti puri dalam pilkada Kabupaten Gianyar awalnya terjadi pasca Orde Baru yakni mengulangi rivalitas lama antara Puri Ubud dengan Puri Gianyar serta puri – puri lain di Gianyar yang berafiliasi kepada keduanya. Setelah sekian lama anggota keluarga Puri Ubud yang memimpin Kabupaten Gianyar, transisi politik pasca tumbanganya Soeharto memungkinkan terbukannya kesempatan politik bagi seluruh pihak. Alih – alih kekuatan politik lain (non – puri) mampu memanfaatkan peluang politik untuk regenerasi kepemimpinan di Gianyar, kontestasi politik pasca Orba di Gianyar sejauh ini mengulangi kontestasi elite lama ketika Puri Gianyar muncul kembali sebagai pemimpin di Kabupaten Gianyar. Fenomena yang menarik pasca Orde Baru di Gianyar

adalah semakin meningkatnya praktisi pariwisata yang masuk partai politik. Dalam setiap perhelatan pilkada di Kabupaten Gianyar pasca Orde Baru, isu kewilayahan dan pariwisata selalu menjadi perbincangan hangat. Sebagai kecamatan dengan konsentrasi pemilih yang besar, Kecamatan Gianyar dan Ubud selalu menjadi salah satu pertimbangan penentuan kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Isu bahwa kandidat Bupati dan Wakil Bupati Gianyar harus paham soal pariwisata. (Dwiputra, 2013: 7).

Proses pemilihan Bupati – Wakil Bupati Gianyar 2002 – 2007 yang masih dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gianyar, rivalitas Puri Puri Ubud dan Puri Gianyar kembali menyeruak, dimana munculnya AA Bharata (tokoh Puri Gianyar) sebagai pemenang. Pada

pemilihan Bupati Gianyar Tahun 2007 dimana merupakan misi balas dendam dari Puri Ubud kepada Puri Gianyar yakni dengan kegagalan Cok Ace dalam pemilihan bupati Gianyar sebelumnya yang dilakukan oleh DPRD Gianyar menimbulkan rasa jengah di kalangan persaudaraan keluarga yang dikenal sebagai Keluarga Dalem Sukawati (KDS) sementara disisi lain keluarga Puri Gianyar yang di kenal sebagai Keluarga Dewa Agung Manggis mengalami euphoria kebangkitan kembali setelah sekian lama mati suri. 'Dendam' Puri Ubud kemudian seperti terlampiaskan ketika Cok Ace memenangkan kursi nomor satu di Gianyar mengalahkan AA Bharata sebagai incumbent. Cok Ace - Sutanaya meraih 128.892 suara (52,22%) Paket Cok Ace-Sutanaya meraih keunggulan telak di tiga kecamatan, yaitu Ubud, Tegallalang, dan Payangan sedangkan Bharata-Yudha hanya unggul tipis di empat kecamatan, yaitu Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, dan Tampaksiring, sedangkan Bharata-Yudha meraih 117.936 suara (47,78%) dari total suara 246.828 (News Detik.com, 2008).

Pada pilbup Gianyar 2007 Puri Ubud mendapatkan kemenangan, akan tetapi Puri Peliatan sebagai puri pusat dari Puri Ubud yang bertarung pada pilkada kabupaten Gianyar 2012 kalah melawan Puri Gianyar, dimana Cok Nindya dan pasangannya memperoleh suara (23%), sedangkan lawannya AA Bharata dari Puri Gianyar kembali melaju sebagai pemegang kekuasaan nomor satu di Gianyar dengan mendapatkan suara (73%) (News Detik.com, 2013). Kemenangan AA Bharata bisa disebut sebagai 'pembalasan' Keluarga Agung Manggis (Puri Gianyar) kepada Keluarga Dalem Sukawati yaitu Puri Peliatan

dengan Puri Ubud dikarenakan kedua puri ini berasal dari sebuah keluarga besar ataupun berasal dari kawitan (klan) yang sama.

Cok Nindya dari Puri Peliatan yang merupakan anggota Keluarga Dalem Sukawati (KDS), Cok Nindya dianggap lebih dekat dengan Keluarga Dewa Agung Manggis (Puri Gianyar). Dikarenakan Cok Nindya sendiri merupakan sepupu pertama dari AA Bharata terlebih lagi pasangan Cok Nindya yaitu Gung Ngurah merupakan adik kandung dari AA Bharata. Maka dari itu Puri Ubud menganggap jika pilkada 2012 adalah settingan keluarga Puri Gianyar, dimana siapapun pemenangnya mereka akan tetap ada di dalam kekuasaan.

Kekuasaan dan kejayaan dari Puri Gianyar kembali berlanjut lagi pada pilkada kabupaten Gianyar tahun 2018 didapatkan dikarenakan kemenangan melawan rivalnya dari Keluarga Dalem Sukawati yaitu Puri Ubud, berdasarkan hitung cepat yang dirilis KPU Gianyar, Pasangan Agus Mahayatra dan AA Gd Mayun unggul dengan perolehan 192.533 suara (67,04 persen) sedangkan Berdasarkan hitung cepat KPU, Kertha Maha atau biasa disebut Cok Ibah hanya memperoleh 94.666 suara (32,96 persen) (News Detik.com, 2018).

Rivalitas elite puri dalam pilkada Gianyar memberikan warna dan mendominasi landscape sosial politik di Gianyar dan dalam derajat tertentu di Bali. Kekuatan politik di Kabupaten Gianyar ini menjadi kekuasaan yang saling bergantian, bersaing mendominasi panggung politik. Elite puri mengulangi peranan di masa kolonial yang mendapatkan kembali privilegije mereka lewat kebijakan swatantra. Elite puri akan memperlihatkan pembertahanan dalam dinamika sirkulasi perpolitikan yang ada

(Dwiputra, 2013:8). Rivalitas dalam pertarungan politik di Gianyar memperlihatkan bagaimana sebuah simbol kebudayaan (puri) bertarung dalam kontestasi politik pada pemilihan Bupati Gianyar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Peneliti sebelum memasuki teori konflik dari Ralf Dahrendorf, didukung oleh dua teori yang pertama dari Clifford Geertz dan Geoffery Robinson. Clifford Geertz (1980) dalam penelitian ini sangat menggambarkan Puri Ubud dengan Puri Peliatan. Puri Ubud dalam aspek kulturalnya sangat dramatisasi di hadapan publik ditinjau dari kekuasaan yang dimiliki. Upacara dan ritual dari Puri Ubud menjadi kekuatan pendorong sesungguhnya politik istiana, dan ritual secara massal ini bukan alat untuk membumikan negara (puri), melainkan puri itulah terakhir eksistensinya sebagai alat untuk menyelenggarakan ritual massal kekuasaan dimaksudkan untuk melayani semua prosesi seremoni tersebut, bukan prosesi seremoni melayani kekuasaan (Geertz, 2017:21-22).

Konteks puri dalam penelitian ini harus menyediakan ekspresi-ekspresi yang dapat dikonsumsi, berjuang terus menerus mengembangkan kemampuan untuk memobilisasi manusia dan materi supaya dapat melaksanakan upacara dan ritual yang lebih besar lagi dan mewah. Kendati demikian puri sebenarnya sedang mengupayakan secara langsung hal yang justru berkebalikan dari bentuk pengorganisasian politis yang menuntut mereka untuk bisa mempersatukan (Geertz, 2017:33). Di titik ini, secara umum daya

pendorong kehidupan publik masyarakat sesungguhnya adalah upacara – upacara adat dan keagamaan yang dilakukan para bangsawan untuk mendeskripsikan statusnya itu (Geertz, 2017: 57). Pertunjukan ritual dari Puri Ubud sangat menggambarkan bagaimana puri dan elite sebagai simbol sakral yang mengikat masyarakat maupun sebagai aktor politik. Selain itu, Puri Peliatan juga mencerminkan pembertahanan identitas hanya melalui modal kultural. Dilihat dari Upacara dan ritual yang megah seperti Puri Ubud.

Dalam menggambarkan Puri Gianyar peneliti menggunakan teori dari Geoffry Robinson (1995) dimana tabiat kebijakan kolonial Belanda dalam membentuk atau menginspirasi bentuk – bentuk akan khusus kesadaran dan organisasi politik. Intrik politik dan perang saudara banyak sekali, dan terjadi tanpa interupsi yang signifikan sampai permulaan abad ke-20. Restorasi raja – raja Bali dan langkah kembali ke tradisi merupakan bagian dari strategi Belanda untuk menjaga stabilitas politik, namun tidak selalu mencerminkan rasa hormat yang tulus kepada raja itu sendiri. Sebuah memo resmi pada tahun 1946 menggambarkan raja Gianyar sebagai “pengatur sifat jahat dan pemerias oriental”. Belanda yang relative singkat, dan kekayaan tanah mereka tidak disita. Restorasi berarti kelanjutan daulat kerajaan tapi ditambah prestise gelar dan hak istimewa kerajaan. Dengan dukungan negara kolonial, keluarga kerajaan di wilayah – wilayah tersebut menjadi semakin kuat (Robinson, 2006: 71-72). Otoritas yang tertinggi dan terdahulu dari negara kolonial di Bali membentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi, serta membangun wacana politik.

Puri Gianyar dalam identitasnya dan perkembangannya dalam aspek perpolitikan memang tidak terlepas dari kebijakan zaman kolonial serta hubungan politik yang dimiliki. Dilihat kembali pada zaman kerajaan puri sangat keras dan penuh dengan pertempuran akan tetapi pengaruh dari kolonial belanda dan dibuatnya Baliseering (balialiansi) yang dimulali tahun 1920, yang menciptakan bagaimana kultur puri yang keras akan kekuasaannya berganti dalam bentuk puri yang damai dan tertib tanpa ada peperangan. Pola ini merefleksikan batas – batas legal yang dipaksakan oleh negara kolonial.

Pembangkangan terhadap perintah atau tuntutan raja Gianyar pada hakikatnya adalah tindakan perlawanan politik yang dimasa lalu, dengan dukungan perbekel atau punggawa, mungkin dapat diharapkan membuahkan hasil positif. Akan tetapi, sikap yang diambil dalam memadamkan berbagai tindakan perlawanan itu menunjuk pada perubahan penting dalam jangkuan dan sifat kekuasaan para raja di bawah pemerintahan kolonial (Robinson, 2006:101). Penggambaran Puri Gianyar saat ini di era reformasi tidak terlepas dari pengaruh sejarah zaman kolonial yang mempengaruhinya. Dimana kedetakan dan hubungan politik yang dibangun tidak terlepas dari kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai khususnya dalam perpolitikan di Gianyar.

Teori konflik dari Ralf Dahrendorf (1986) yang menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang

dinamakan “Imperatively coordinated associations” (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial. Pokok pikiran yang terkandung menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf yaitu: 1. Setiap masyarakat manusia tunduk pada proses perubahan; perubahan ada dimana-mana 2. Disensus dan konflik terdapat dimana-mana 3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat 4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain (Rosana. 2015: 219).

Teori dari Ralf Dahrendorf berkorelasi dengan penelitian ini dikarenakan konflik dalam kontestasi politik di Gianyar ini merupakan sebuah kepentingan kedua kelompok elite dimana Puri Gianyar berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya sedangkan kelompok dari Puri Peliatan dan Puri Ubud yang membentuk hubungan politik dari sisi kerjasama berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan dan akan memberikan suatu dampak perubahan. Dengan demikian konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial yang berkaitan dengan sebuah bentuk kekuasaan dalam suatu wilayah. Realitas ini memperlihatkan bagaimana adanya sebuah perbedaan,

rivalitas, dan konflik. Suzzane Keller menjelaskan definisi elite dimana berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi yang

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder, untuk mendeskripsikan dan menggambarkan rivalitas elite Puri Ubud, Puri Peliatan, dengan Puri Gianyar dalam pemelukada Kabupaten Gianyar tahun 2012-2018

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti mempertimbangkan informan-informan yang dipilih menguasai dan paham serta mengetahui informasi tentang penelitian yang diangkat. Informan utama elite dari Puri Ubud, Puri Peliatan, dan Puri Gianyar. Untuk informan pendukung merupakan DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar, Ketua Dewan Penasehat PDIP, dan Budayawan Muda Gianyar. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan observasi. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Peneliti juga menggunakan teknik analisa data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Sejarah Kabupaten Gianyar

Sejarah Kabupaten Gianyar, tepatnya 245 tahun yang lalu, 19 April 1771, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton, Puri Agung yaitu Istana Raja (Anak

Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti maka sebuah kerajaan yang berdaulat dan otonom telah lahir serta ikut pentas dalam percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Sesungguhnya berfungsinya sebuah kerton yaitu Puri Agung Gianyar yang telah ditentukan oleh syarat sekala niskala yang jatuh pada tanggal 19 April 1771 adalah tonggak sejarah yang telah dibangun oleh raja (Ida Anak Agung) Gianyar I, Ida Dewata Manggis Sakti memberikan syarat kepada kita bahwa proses menjadi dan ada itu bisa ditarik kebelakang (masa sebelumnya) atau ditarik kedepan (masa sesudahnya).

Lima Raja Bali yang bergelar Ida Dalem Ketut Ngulesir (1380-1460),² Ida Dalem Waturenggong (1460-1550),³ Ida Dalem Sagening (1580-1625) dan 5) Ida Dalem Dimade (1625-1651). Dua Raja Bali yang terakhir yaitu Ida Dalem Segening dan Ida Dalem Dimade telah menurunkan cikal bakal penguasa di daerah-daerah. Ida Dewa Manggis Kuning (1600-an) penguasa di Desa Beng adalah cikal bakal Dinasti Manggis yang muncul setelah generasi II membangun Kerajaan Payangan (1735-1843). Salah seorang putra raja Klungkung Ida Dewa Agung Jambe yang bernama Ida Dewa Agung Anom muncul sebagai cikal bakal dinasti raja-raja di Sukawati (1711-1771) termasuk Peliatan dan Ubud. Pada periode yang sama yaitu periode Gelgel muncul pula penguasa-penguasa daerah lainnya yaitu I Gusti Ngurah Jelantik menguasai Blahbatuh dan kemudian I Gusti Agung Maruti menguasai daerah Keramas yang keduanya adalah keturunan Arya Kepakisan.

Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II. Kemudian

disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut Bupati. (Gianyarkab.go.id, 2021:1).

Rivalitas Elite Puri Ubud, Puri Peliatan, dengan Puri Gianyar dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2018

A. Pemilukada Kabupaten Gianyar Tahun 2012

Pemilukada di tahun 2012 ini merupakan lanjutan rivalitas lama serta menjadi suatu kontes yang memperlihatkan pertarungan antara kekerabatan (saudara), pertarungan identitas klan (kawitan), dan pertarungan lama antara Partai Golkar dengan PDIP. Kontestasi politik Pilkada 2012 merupakan hal utama dalam penelitian ini yang melahirkan sebuah rivalitas antara Puri Peliatan dengan Puri Gianyar.

Pilkada Gianyar tahun 2012 memperlihatkan sesuatu yang unik dan suasana ketika pilkada tersebut sangat memanas. Dimana elite dari Puri Gianyar A.A Bharata (Calon Bupati) yang berpasangan dengan Agus Mahasaytra (Calon Wakil Bupati) dan diusung oleh partai PDIP melawan elite dari Puri Peliatan Cok Nindya (Calon Bupati) dengan adik dari A.A. Bharata yaitu Gung Ngurah (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Golkar. Selain pertarungan kakak dan adik ini, juga dalam hubungan kekeluargaan A.A Bharata memiliki hubungan dengan Cok Nindya dimana ayah dari A.A. Bharata mempunyai saudara kandung yaitu ibu dari Cok Nindya. Konteks pemilu ini merupakan kontestasi politik yang diikuti oleh kakak dan adik ini

menambah warna demokrasi dimana mereka bertarung dalam pemilu melalui partai yang berbeda dan juga keterikatan hubungan keluarga antara kedua elite tersebut.

Relasi antara Puri Peliatan dengan Puri Ubud tidak terlepas dari historisnya dimana Puri Ubud merupakan pengembangan dari puri pusat yaitu Puri Peliatan. Hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas kekeluargaan (kekerabatan), akan tetapi juga berkaitan dengan klan dari Dalam Sukawati (KDS), yang memperlihatkan sebuah kekompakan ketika mendukung sebuah calon yang bertarung dalam pilkada khususnya di Gianyar. Ketika pilkada Gianyar tahun 2012 Puri Ubud mendukung Cok Nindya untuk bertarung merebut kekuasaan nomor satu di Gianyar.

Sebaliknya juga ketika ada elite dari Puri Ubud yang maju dalam kontestasi politik Puri Peliatan memberikan dukungan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hubungan kekeluargaan senantiasa akan bertransformasi menjadi hubungan politik. Indikator yang penting dalam relasi kedua puri ini untuk mempertahankan simbol kekuasaan.

Dalam hasil perhitungan suara terkait rivalitas kontestasi politik antara dua puri ini pada pilkada Gianyar 2012 dimenangkan oleh A.A Bharata (Puri Gianyar) yang berpasangan dengan Made Mahasaytra. Kemenangan yang diperoleh dengan mendapatkan (73%) suara, sedangkan Cok Nindya (Puri Peliatan) hanya mendapatkan perolehan suara (23%) (News Detik.Com, 2013). Hal ini memperlihatkan bagaimana sirkulasi kekuasaan Gianyar kembali ke PDIP sebagai pemenang Pilkada Gianyar tahun 2012.

Kemenangan dalam kompetisi politik ini memperlihatkan bagaimana solidnya koalisi yang dibangun serta mesin partai yang dimiliki sangat cepat masuk kedalam masyarakat. Selain itu ketokohan yang dimiliki oleh A.A Bharata sangat mempengaruhi pilihan dimana kepemilikan atas modal – modal yang digunakan ketika berkampanye. Itu mencirikan bagaimana jangkauan kekuasaan dari Puri Gianyar sudah tertanam didalam wilayah – wilayah Gianyar, selain itu massa yang dimiliki sudah teroganisir sejak lama (loyalis). Juga dilihat dari Partai PDIP yang memiliki ikatan sejarah dengan Gianyar dan susah untuk dilepaskan dikarenakan juga ikatan tersebut dari zaman dahulu sudah di pertahankan oleh Puri Gianyar dan ketika Pilkada Gianyar puri akan menggunakannya sebagai kendaraan utama menuju kekuasaan.

Ketika Cok Ace sebagai Bupati Gianyar tahun 2008 yang tidak maju sebagai incumbent sudah menjadi isyarat penting yang mengindikasikan kekalahan pasangan Cok Nindya dan Gung Ngurah. Dimana ada rumor beredar dahulu Cok Ace ekstabilitas kepemimpinannya di periode tersebut masih minim dan juga terkait prestasinya selama memimpin Gianyar. Hal itu juga memperlihatkan ada pertimbangan – pertimbangan yang matang untuk tidak melanjutkan kepemimpinan dan tidak mempertaruhkan nama besar jika kalah nantinya dalam pilbul 2012 tersebut. Kekalahan dari pasangan Cok Nindia dengan Gung Ngurah juga tidak terlepas dari lemahnya mesin Partai kolaborasi dimana hanya membuktikan kemenangan dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Ubud yang notabennya merupakan cakupan kekuasaan dari Puri Peliatan. Mesin partai susah untuk

menyebarkan jangkauannya dikarenakan kurang solid dan kurangnya loyalis massa yang tetap. Kekalahan pasangan juga dikarenakan kurangnya ketokohan yang dimiliki serta modal – modal yang digunakan masih kurang.

Kejayaan dan kekuasaan kembali ke Puri Gianyar sebagai pemenang pilbup Gianyar 2012, memperlihatkan suatu fenomena yang menarik dimana tetap bertahannya eksistensi puri sebagai produk pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat dan dominannya puri dalam kontestasi politik di Kabupaten Gianyar. Kontestasi ini juga semakin menguat didalam sejarah perpolitikan di Gianyar dikarenakan tiga kandidat yang bertarung yaitu A.A Bharata, Cok Nindya, dan Gung Ngurah masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Pemilukada tahun 2012 memperlihatkan dinamika politik lokal yang mencerminkan bagaimana kekuasaan pada masa kolonial masih bertahan di tengah zaman reformasi. Transisi dan gaya kepemimpinan dari elite puri berbeda – beda, dimana elite puri memiliki tujuan untuk melebarkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang sudah ada. Konflik yang terjadi tidak terlepas dari sejarah yang mengikat elite. Secara tidak langsung sistem pemerintahan saat ini sangat berkaitan dengan sistem kerajaan zaman dahulu yang saat ini kembali sebagai bentuk identitas kekuasaan antara elite puri. Kontestasi pemilu 2012 juga dikaitkan sebagai pertarungan yang memperlihatkan simbol dari masing – masing klan sebagai identitas elite.

Pemilukada Kabupaten Gianyar Tahun 2018

Kegagalan dari Puri Peliatan yang didukung oleh Puri Ubud ketika pilbup Gianyar 2012 mengindikasikan akan ada rivalitas yang terulang. Dalam aspek ini Puri Ubud yang mengambil kesempatan untuk bertarung pada kontestasi politik pemilihan Bupati di Kabupaten Gianyar tahun 2018 yang kembali memperlihatkan rivalitas antara Puri Ubud dengan Puri Gianyar. Cok Ibah sebagai (Calon Bupati) dari Puri Ubud berpasangan dengan Maharani (Calon Wakil Bupati) melawan Agus Mahayastra (Calon Bupati) yang berpasangan dengan A.A Mayun (Calon Wakil Bupati) dari Puri Gianyar. Pilbup Gianyar 2018 juga kembali memperlihatkan rivalitas parati Golkar dengan PDIP.

Kontestasi pilbup Gianyar tahun 2012 yang memperlihatkan perbedaan dukungan antara saudara A.A Bharata dengan Gung Ngurah dalam Puri Gianyar. Ketika pilbup Gianyar tahun 2018 kembali terulang, diaman perbedaan dukungan yang terlihat, antara Cok Ace dari Puri Ubud yang bertarung di pilgub Bali 2018 dan diusung oleh PDIP memperlihatkan dukungannya kepada A.A Mayun dari Puri Gianyar yang bertarung melawan Cok Ibah dari Puri Ubud sekaligus saudara dari Cok Ace. Perbedaan koalisi dan dukungan ini memperlihatkan fenomena penting bagaimana perbedaan arus kepentingan dan kekuasaan menjadikan konflik politik yang hanya muncul ketika pilbup berlangsung dan berdampak kepada hubungan atau relasi yang sudah terjalin.

Rivalitas pada kontestasi politik ini memang tidak terlepas dari peranan stakeholders dimana banjar, puri, Pura, serta seluruh komponen berkaitan berjaln dengan partai politik serta tokoh – tokohnya dalam

kontestasi politik di pilkada Gianyar 2018. Kedua elite yang bertarung memperlihatkan dan menggunakan kekuasaanya masing – masing dimana jaringan, ketokohan, massa, partai, dan modal ikut serta sebagai pendorong suara elite untuk memperoleh kekuasaan. Persaingan politik antara kedua elite puri menghasilkan bentuk konkret bagaimana kekuasaan dan status klan (kawitan) yang dimiliki kembali dipertaruhkan dalam kontestasi politik tersebut. Status yang dimiliki masing – masing elite puri sangat melnadasi kepentingan dalam perpolitikan di Gianyar, sekaligus sebagai pengekspresian kedudukan dalam suatu tatanan masyarakat.

Ketika memulai perhitungan suara pilbup Gianyar 2018 pasangan Agus Mahayastra dengan A.A Mayun menang dengan perolehan suara (67,04%) melawan pasangan Cok Ibah dengan Maharani yang memperoleh suara (32,96%) (NusaBali.com, 2018). Hal ini memperlihatkan bagaimana kejayaan Puri Gianyar dan status kekuasaan di dalam masyarakat kembali di pertahankan.

Dalam kepemilikan kekuasaan secara modal dan kekuatan mesin partai politik pasangan Agus Mahayastra dengan A.A Mayun (Paket Aman) memang mengungguli pasangan Cok Ibah dengan Maharani (Paket Kertha Maha). Dilihat dari wilayah kekuasaan paket aman unggul di 6 kecamatan sedangkan paket kertha maha hanya unggul di 1 kecamatan yaitu Kecamatan Ubud. Hasil dari pilbup Gianyar 2018 tidak jauh dari hasil pilbup Gianyar tahun 2012 dimana Cok Nindya dan Gung Ngurah hanya unggul di Kecamatan Ubud.

Kegagalan dan kekalahan dari Puri Peliatan dan Puri Ubud pada pilbup Gianyar

yang terulang dari tahun 2012 – 2018 merupakan hal yang wajar ketika terjun kedalam kontestasi politik. Pertarungan antara elite puri juga berdampak kepada kontestasi basis antara PDIP dengan Partai Golkar. Selain itu secara massa memang Puri Gianyar masih mengungguli Puri Ubud dikarenakan cakupan wilayah kekuasaan Puri Gianyar cukup luas dibandingkan dengan Puri Ubud. Akan tetapi secara modal ekonomi Puri Ubud lebih unggul. Dari konteks tersebut dapat diartikan sebagai identitas dari elite Puri Gianyar sebagai puri yang kuat dalam perpolitikan, sedangkan elite Puri Ubud kuat dengan modal ekonomi yang dimiliki.

Perebutan dalam suatu aspek politik dan ekonomi merupakan sebuah modal yang sudah dimiliki oleh elite – elite puri, akan tetapi nilai dari kekuasaan yang dimiliki dari modalnya terdapat perbedaan. Aspek struktural dan kultural yang menjadikan pilbup Gianyar 2012 – 2018 tidak terlepas dengan elite puri. Konflik yang menghasilkan rivalitas juga memfokuskan dimana satu elite puri mempertahankan kekuasaannya dan elite puri yang menjadi lawan berusaha merebut kekuasaan. Konflik ini mengindikasikan bahwa proses perebutan kekuasaan dalam konteks pemilihan bupati di Kabupaten Gianyar adalah proses regenerasi elite yang didominasi oleh kelompok elite dari keluarga puri.

Analisis Hasil Temuan

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas mengenai hasil temuan terkait penelitian penulis. Dalam hasil temuan telah dijabarkan mengenai rivalitas elite Puri Ubud, Puri Peliatan, dengan Puri Gianyar dalam pemilukada Kabupaten Gianyar tahun 2012-2018.

Untuk masuk kedalam teori dari Ralf Dahrendorf disini peneliti didukung dua teori, teori dari Clifford Geertz (1980) yang menggambarkan Puri Ubud dengan Puri Peliatan dan Geoffrey Robinson (1995) yang menggambarkan Puri Gianyar. Selanjutnya teori konflik dari Ralf Dahrendorf dalam penelitian ini menjadi pisau analisa utama yang memperlihatkan hasil konkret yang mudah untuk dipahami. Pada bab sebelumnya analisis dari teori konflik Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa sirkulasi elite atau regenerasi kekuasaan di Kabupaten Gianyar dalam konteks politik pemilukada. Dalam penelitian ini juga memperlihatkan konflik yang terjadi antara kelompok elite.

Kontestasi politik Pilkada 2012 merupakan hal utama dalam penelitian ini yang melahirkan sebuah rivalitas antara Puri Peliatan dengan Puri Gianyar. Pilkada Gianyar tahun 2012 memperlihatkan konflik politik antara saudara. Dimana elite dari Puri Gianyar A.A Bharata (Calon Bupati) yang berpasangan dengan Agus Mahasaytra (Calon Wakil Bupati) dan diusung oleh parati PDIP melawan elite dari Puri Peliatan Cok Nindya (Calon Bupati) dengan adik dari A.A. Bharata yaitu Gung Ngurah (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Golkar. Selain pertarungan kakak (A.A Bharata) dan adiknya (Gung Ngurah), juga dalam hubungan kekerabatan antara keluarga dimana antara A.A Bharata dengan Cok Nindya. Ayah A.A. Bharata memiliki saudara kandung yaitu ibu dari Cok Nindya. Hal ini memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan akan merubah suatu keadaan dan hubungan antara saudara serta dalam ikatan keluarga pada konteks politik.

Hasil perhitungan suara sekaligus memperlihatkan hasil dari rivalitas kontestasi politik antara dua puri ini pada pilkada Gianyar 2012 dimenangkan oleh A.A Bharata (Puri Gianyar) yang berpasangan dengan Made Mahasaytra. Kemenangan yang diperoleh dengan mendapatkan (73%) suara, sedangkan Cok Nindya (Puri Peliatan) hanya mendapatkan perolehan suara (23%) (News Detik.Com, 2013). Dalam analisis temuan peneliti seperti teori dari Ralf Dahrendorf menjelaskan dalam konflik memperlihatkan perbedaan kepentingan tersebut didasarkan oleh kekuasaan yang ingin dicapai.

Kegagalan dari Puri Peliatan yang didukung oleh Puri Ubud ketika pilbup Gianyar 2012 mengindikasikan akan ada rivalitas yang terulang. Dalam aspek ini Puri Ubud yang mengambil kesempatan untuk bertarung pada kontestasi politik pemilihan Bupati di Kabupaten Gianyar tahun 2018 yang kembali memperlihatkan rivalitas antara Puri Ubud dengan Puri Gianyar. Cok Ibah sebagai (Calon Bupati) dari Puri Ubud berpasangan dengan Maharani (Calon Wakil Bupati) melawan Agus Mahayastra (Calon Bupati) yang berpasangan dengan A.A Mayun (Calon Wakil Bupati) dari Puri Gianyar. Pilbup Gianyar 2018 juga kembali memperlihatkan rivalitas parati Golkar dengan PDIP. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana selain konflik antara elite juga konflik lama antara PDIP dan Golkar. Secara konteks kekuasaan memang dominasi kedua paratani ini sebagai rival sangat lumrah dalam masyarakat Gianyar. Dapat dilihat dari fokus penelitian dari pilbup 2012-2018 PDIP masih mengungguli Golkar dalam dinamika politik pada pilbup di Kabupaten Gianyar.

Rivalitas pada kontestasi politik ini memang tidak terlepas dari peranan stakeholders dimana banjar, puri, Pura, serta seluruh komponen berkaitan berjaln dengan partai politik serta tokoh – tokohnya dalam kontestasi politik di pilkada Gianyar 2018. Kedua elite yang bertarung memperlihatkan dan menggunakan kekuasaannya masing – masing dimana jaringan, ketokohan, massa, partai, dan modal ikut serta sebagai pendorong suara elite untuk memperoleh kekuasaan. Ketika perhitungan suara pilbup Gianyar 2018 pasangan Agus Mahayastra dengan A.A Mayun menang dengan perolehan suara (67,04%) melawan pasangan Cok Ibah dengan Maharani yang memperoleh suara (32,96%) (NusaBali.com, 2018).

Kegagalan dan kekalahan dari Puri Peliatan dan Puri Ubud pada pilbup Gianyar yang terulang dari tahun 2012 – 2018 merupakan hal yang wajar ketika terjun kedalam kontestasi politik. Aspek struktural dan kultural yang menjadikan pilbup Gianyar 2012 – 2018 tidak terlepas dengan elite puri. Dalam analisis temuan peneliti mengungkapkan dari teori konflik Ralf Dahrendorf bahwa elite dari Puri Gianyar bekepentingan untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah dimenangkan dari tahun 2012-2018 pada fokus peneliti. Sedangkan lawannya dari elite Puri Ubud dan elite Puri Peliatan berusaha dan berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan dari elite Puri Gianyar dan memberikan sebuah bentuk perubahan kekuasaan di Gianyar dan akan berdampak pada bentuk perubahan sosial. Ralf Dahrendorf juga menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Dahrendorf mengakui bahwa

terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur yakni konsensus dan konflik. Konsep elite politik juga menggambarkan bagaimana elite merupakan tokoh penting yang merujuk pada individu-individu yang menduduki posisi jabatan politik di ranah lokal. Elite Politik sebagai pemegang kekuasaan mencakup kepemimpinan dan formasi sosial yang biasanya merupakan asal usul para pemimpin, dan kepadanya diberikan pertanggung jawaban, selama suatu jangka waktu tertentu. Selain itu, konsep kekuasaan juga mendukung dalam analisa peneliti dimana masing – masing puri memiliki sumber kekuasaan, cakupan kekuasaan, dan wilayah kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan tersebut masih diungguli oleh elite Puri Gianyar pada pilbup 2012-2018. Dari analisis hasil temuan penelitian juga mengungkapkan pilbup Gianyar tahun 2012-2018 merupakan proses regenerasi kepemimpinan, dimana elite puri selalu mendominasi kontestasi politik di Gianyar.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum pada rumusan masalah pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan dan analisa, Pilkada Gianyar tahun 2012 memperlihatkan konflik politik antara saudara. Dimana konflik elite dari Puri Gianyar A.A Bharata (Calon Bupati) yang diusung PDIP melawan adiknya Gung Ngurah (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Golkar. Selain pertarungan kakak dan adik, juga dalam hubungan kekerabatan antara keluarga dimana antara A.A Bharata dengan Cok Nindya. Ayah A.A. Bharata

memiliki saudara kandung yaitu ibu dari Cok Nindya. Pilkada Gianyar 2012 dimenangkan oleh A.A Bharata (Puri Gianyar). Kegagalan dari Puri Peliatan yang didukung oleh Puri Ubud ketika pilbup Gianyar 2012 mengindikasikan akan ada rivalitas yang terulang. Dalam hal ini Puri Ubud yang mengambil kesempatan untuk bertarung dalam pilbup Gianyar tahun 2018. Dimana ketika itu Cok Ibah (Calon Bupati) dari Puri Ubud melawan rivalnya dari Puri Gianyar A.A Mayun sebagai (Calon Wakil Bupati). Kemenangan dan kejayaan kekuasaan kembali ke Puri Gianyar. Rivalitas lama ini akan terus berulang dalam ranah kontestasi politik di Kabupaten Gianyar. Selain itu konflik ini memperlihatkan pertarungan nama klan (kawitan) dan juga sebagai pertarungan modal politik yang dimiliki oleh elite Puri Gianyar dengan Puri Ubud yang memiliki modal ekonomi.

6. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan Edisi Revisi. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, Clifford. (2017). *Negara Teater*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- J. Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robinson, Geoffry. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Diterbitkan LKiS. Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

ARTIKEL JURNAL:

- Dwiputra, I Made Arsana. 2013. *Dinamika Demokrasi dan Kepemimpinan*

di Gianyar, Bali Pasca Orde Baru.

Ichwannuddin, Wawan dan Calvin. *Dinamika Peran Puri Bali dalam Politik Lokal Pada masa pasca-orde baru: Studi kasus Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar*, Jakarta. *Jurnal (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013).*

Putri, Rany Rizkyah, *Konflik Sosial dalam Novel Dawuk: Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf, Jurnal (Jambi: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, 2018).*

Rosana, Ellya, *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern, Jurnal (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Lampung, 2015).*

SKRIPSI:

Mahadewi, Ida Ayu Mas, “*Dominasi Peran Puri Dalam Kontestasi Politik di Bali (Studi Kasus: Puri Agung Denpasar)*”, Skripsi. (Bali: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2017).

Warliana, Lisna, “*Rivalitas Politik Yang Berkelanjutan Pa dan Pasca Pilkada di Desa TA” Cipong Kecamatan Amali Kabupaten Bonei*”, Makassar. Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

Wintara, I Gusti Ngurah Guna, “*Network Elite Puri Agung Ubud Dalam Aspek Religius, Ekonomi, dan Politik*”, Bali. Skripsi (Bali: Universitas Udayana, 2020).

INTERNET:

Balitoursclub.net, 2020. Sejarah Kerajaan Gianyar. Tersedia pada <https://www.balitoursclub.net/sejarah-kerajaan-gianyar/>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 22.00 WITA).

Balitribune.co.id.com, 2018. Kertha Maha Nomor Urut Satu, AMAN Nomor Urut Dua. Tersedia pada, <https://balitribune.co.id/content/kertha-maha-nomor-urut-satu-aman-nomor-urut-dua>, (diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 17.00 WITA).

Bappeda. Gianyarkab.go.id, 2014. Gambaran Umum Kabupaten Gianyar. Tersedia pada <http://bappeda.gianyarkab.go.id/index.php/baca-artikel/3/Gambaran-Umum-Kabupaten-Gianyar>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 20.00 WITA).

Gianyarkab.go.id, 2021. Sejarah Kota Gianyar. Tersedia pada <https://www.gianyarkab.go.id/profil/8/Sejarah>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 20.00 WITA).

News.detik.com, 2008. Pilkada Gianyar Golkar Ungguli PDIP. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-878944/pilkada-gianyar-golkar-ungguli-pdip>, (diakses pada

tanggal 28 Maret 2020 pukul 22.00 WITA).

NusaBali.com, 2018. Hasil Perolehan Suara Pilkada Gianyar 2018. Tersedia pada,
<https://www.nusabali.com/berita/32928/paket-aman-menang-kerthamaha-pilih-istirahat>, (diakses pada tanggal 30 April 2021 pukul 18.00 WITA).

Propinsi Bali.com, 2012. Gianyar Kembali Jatuh Ke PDIP. Tersedia pada <http://www.propinsibali.com/2012/11/gianyar-kembali-jatuh-ke-pdip.html>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 20.00 WITA).

